

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Maluriwu Kecamatan Palue Kabupaten Sikka, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban sepenuhnya sudah dikelola secara akuntabel.

1. Tahap perencanaan, dalam proses perencanaan ada musyawarah rencana penggunaan dana desa, kesulitan dalam mengakses informasi rencana penggunaan dana desa, adanya laporan mengenai rincian dana dan kegiatan penggunaan dana desa dan dalam proses perencanaan penggunaan dana desa tim pelaksanapun turut ikut hadir dalam musyawarah.
2. Tahap pelaksanaan. Dalam proses pelaksanaan dana desa di desa Maluriwu sudah dilakukan secara terbuka, informasi mengenai laporan berkala penggunaan dana desa tersedia tetapi masyarakat mengalami kesulitan dalam mengaksesnya, ada partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dana desa dan adanya keterlibatan tim pelaksana dalam rapat rencana penggunaan dana desa.
3. Tahap Pertanggungjawaban. Dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana desa, adanya keterbukaan hasil pelaksanaan dana desa, tersedianya informasi mengenai laporan pertanggungjawaban dana

desa, adanya kesulitan dalam mengakses informasi mengenai laporan pertanggungjawaban dana desa, keterbukaan informasi mengenai dokumen hasil pelaksanaan dana desa, adanya kesulitan dalam mengakses informasi mengenai dokumen hasil pelaksanaan dana desa, adanya laporan berkala oleh tim pelaksanaan mengenai penerimaan dana desa dan realisasi belanja dana desa, serta adanya laporan akhir oleh tim pelaksana mengenai perkembangan pelaksanaan, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan dana desa.

6.2. Saran

Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desadi Desa Maluriwu kecamatan Palue Kabupaten Sikka, pemerintah diharapkan untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan pengelolaan dana desa yang akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifiyanto, Dwi Febri, dan Kurrohman, Taufik. 2014. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember*. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Jember: Universitas Jember.
- Arikunto, Suharsimi, 1998. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV, Rineka Cipta, Jakarta.
- Astuty, Elgia dan Fanida, Eva H. 2013. *Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) (Studi pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)*. Jurnal. Universitas Negeri Surabaya.
- Faridah. 2015. *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)*. Surabaya: STIESIA Surabaya.
- Mardiasmo. 2006. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sasaran Good Governance*. Jurnal Akuntansi Pemerintahan Vol.2, No.1.
- Moleong, Lexy. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung, PT Remaja Rosdakarya.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta. Erlangga.
- Pemerintah Kabupaten Situbondo. 2013. *Kecamatan Panarukan Dalam Angka*. Situbondo.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- Peraturan Bupati Situbondo Nomor 07 Tahun 2014.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
<http://www.pnri.go.id/Pedoman-Perbaikan-Pedoman-Penyusunan-Pelaporan-Akuntabilitas-Kinerja-instansi-Pemerintah.pdf>. (Diakses tanggal 20 Februari 2019).

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
<http://www.inspektorat.bogorkab.go.id>, (Dii akses pada tanggal 22 Februari 2019).
- Rosalinda, Okta. 2014. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (studi kasus: Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang)*. JurnalIlmiah. Malang: Universitas Brawijaya Malang.
- Sanusi, Anwar. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Solekhan, Moch. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*. Malang: Setara Press.
- Subroto, Agus. 2009. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi dana Desa Di Desa – Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)*. Dipublikasikan. Tesis. Program Studi Magister Sains Akuntansi.Universitas Diponegoro Semarang.
- Sumpeno, Wahjudin. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh: Read.
- Syachbrani, Warka. 2012. *Akuntansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa*. Tugas Akhir Mata Kuliah. Program Magister sains Akuntansi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Thomas. 2013. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebangung Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung*. Dipublikasikan. Skripsi. Program S1 Pemerintah Integratif.Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Mulawarman.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa.
- Usman, Husaini dan Purnomo, Setiady. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wasistiono, Sadu, 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung : Fokus Media.